

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Hafid (Ed.), 2016, *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Ketiga : Islam, Negara dan Keindonesiaan*, Media Consultant & Publishing, Jakarta
- Adam, Ian, 1993, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Alih Bahasa : Ali Noerzaman, Penerbit Qalam, Yogyakarta
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2016, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Alrasid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Alvarez, R. Michael, Thad E. Hall, and Susan D. Hyde (Ed.), 2008, *Election Fraud, Detecting and Deterring Electoral Manipulation*, Brookings Institution Press, Washington D.C.
- Angraini, Titi, dkk., 2011, *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta
- Arif, Saiful (Ed.), 2001, *Birokrasi dalam Polemik*, Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arinanto, Satya, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2016, *Parlemen di Negara Islam Modern, Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, terjemahan oleh Masturi Ilham & Malik Supar, Pustaka Al Kautsar, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, RajaGrafindo, Jakarta

- _____, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta
- Aspinall, Edward & Mada Sukmajati, 2015, *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Penerbit PolGov, Yogyakarta
- Awaludin, Hamid, 2012, *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), 2010, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm
- Azhari, Muhammad Tahir, 2010, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Baut, Paul S. 1990, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Birch, Sarah, 2011, *Electoral Malpractice*, Oxford University Press, UK
- Biro Humas Komisi Pemilihan Umum, 2000, *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955*, Jakarta
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ST. Paul, Minn, Wet Publishing Co.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Budiman, Arief, 2002, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bhagat, Anjana Kaw, 1996, *Elections and Electoral Reforms in India*, Vikas Publishing House PVT. Ltd., New Delhi
- C. Kimberling, William, *The Electoral Collage*, Rivised 1992
- Centre for Electoral Reform (Penunting), 2010, *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, kerjasama International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO, Jakarta
- Chaidar, Al, 1999, *Pemilu 1999, Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, Penerbit Darul Falah, Jakarta, 1419 H

- Chemerinsky, Erwin, 2015, *Constitutional Law, Principles and Policies (Fifth Edition)*, Wolters Kluwer, New York
- Chidmad, Tataq, 2004, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dahl, Robert, 2001, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, diterjemahkan oleh A Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Darwis, Fernita, 2011, *Pemilihan Spekulatif, Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Efriza dan Syafuan Rozi, 2010, *Parlemen Indonesia, Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu, Doeloe, Kini dan Nanti*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Eide, Asbjorn, Carina Krause dan Allan Rosas (Ed), *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Revisi, Edisi Kedua)*, Alih Bahasa Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan Swedish International Development Cooperation Agency (Cida), Jakarta, tanpa tanggal dan tahun terbit
- Emanuel, Steven L., 1976, *Constitutional Law, Twenty-Eighth Edition*, Aspen Publishers, New York
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Fadjar, A. Mukthie dan Harjono (Ed.), 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur bekerjasama dengan Intrans, Malang
- Fajar, A. Mukhtie, 2013, *Pemilu dan Demokrasi, Perselisihan Hasil Pemilu dan Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah*, Setara Pres, Malang
- Fatah, Eep Saefulloh, 1997, dalam *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Pelbagai Kerusakan?* Seri Penerbitan Buku Studi Politik, Kerjasama Kronik Indonesia Baru dengan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta

Feith, Herbert, 1957, *The Indonesian Elections of 1955*, Interim Reports Series, Cornell University, Ithaca, New York

Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Gaffar, Janedjri M., 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta

_____, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta

Global Commission on Elections, Democracy & Security, 2012, *Pedoman Demokrasi : Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Laporan dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan, September 2012

Goodwin-Gill, Guy S., 1994, *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*, Pirac bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta

Gunawan, Andri, dkk., 2014, *Indeks Negara Hukum Indonesia 2013*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta

Hadjon, Philipus M., 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Halim, Abdulllah, 2015, *Pidato Para Khalifah, Persoalan Negara, Demokrasi dan Penegakan Hukum*, INDeS Yogyakarta dan INNUS Surabaya, Yogyakarta

Hamid, Zulkifli, 1999, *Sistem Politik Australia*, Laboratorium Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung

Hamzah, Andi 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta

Harahap, Syahrin, 2000, *Pemilu yang Jurdil dalam Perspektif Forum Rektor Indonesia, Menyoroti Peran Perguruan Tinggi dalam Pemantauan Pemilu dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya bekerjasama dengan Forum Rektor Simpul Wilayah Sumatera Utara, Yogyakarta

Harun, Refly 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta

Haris, Syamsuddin, 2014, *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

- Hasani, Ismail (Editor), 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga, Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawaharah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Ibrahim, Harmaily, *Sistem Pemilu 1977*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanpa tanggal dan tahun terbit
- Imawan, Riswanda, 2011, *Quo Vadis Demokrasi Indonesia*, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM dan PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung
- Indonesia Corruption Watch, 2012, *Annual Report 2012, Hasil Pemantauan Pemilukada 2012*, Jakarta
- International IDEA, *Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Seri Buku Panduan*, tanpa tahun terbit
- Irwan, Alexander dan Edriana, 1995, *Pemilu Pelanggaran Asas Luber*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ishiyama, John T. & Marijke Breuning (Ed.), 2013, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21, Sebuah Referensi Panduan Tematis (Jilid 1)*, Kencana, Jakarta
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Books, Jakarta
- Jones, Pip, 2003, *Pengantar Teori-teori Sosial, dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Alih Bahasa : Saifuddin, Pustaka Obor, Jakarta
- Junaidi, Veri, 2013, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta
- Junaidi, Veri, dkk., 2015, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta
- Kamil, Ahmad, 2002, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T., 1986, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila)*, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Karim, M. Rusli, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali, Jakarta
- _____, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Kasim, Ihdhal (Ed.), 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Keliat, Makmur, dkk. (Ed.), 2001, *Selamatkan Pemilu! Agar Rakyat Tak Ditipu Lagi*, RIDeP, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1992, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford
- Kompas, Libang, 2016, *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Koirudin, 2004, *Profil Pemilu 2004, Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca-pemilu Legislatif 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- _____, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kristiadi, J., T.A. Legowo, dan NT. Budi Harjanto (Ed.), 1997, *Pemilihan Umum 1997, Perkiraan, Harapan dan Evaluasi*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta
- Kumolo, Tjahjo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Penerbit Expose, Jakarta
- Kusuma, RM. A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Leback, Karen, 1986, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Nusamedia
- Lidlle, R. William, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta
- Losco, Joseph dan Leonard Williams, 2005, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer Pemikiran Machiavelli-Rawls, Volume II*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Lovenduski, Joni dan Jill Hills (Ed.), 1981, *The Politics of the Second Electorate, Women and Public Participation*, Routledge & Kegan Paul, London
- Lowenstein, Daniel Hays, et all., 2008, *Electoral Law, Cases and Materials (Fourth Editon)*, Carolina Academic Press, North Carolina
- Madjid, Nurccholish, 1992, *Islam, Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Paramadina, Jakarta
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta
- Mahkamah Konstitusi (2010), *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V, Pemilihan Umum (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2007, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Manan Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta
- _____, 2004, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- _____, 2009, *Dimensi-dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Butir-butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.*, Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (PSKN FH UNPAD), Bandung
- Manan, Munafrizal dan Cholidin, 2015, *Kompilasi Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh MK, "Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015"*, Biro

Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Manuputty, Cavin R. (Ed.), 2011, *Ketidakadilan Pilpres bagi Luar Jawa*, AND Consult, Surabaya

Marsudi, Subandi Al, 2008, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta

Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PUSHAM UII, Yogyakarta

Maryam Rodja, Siti, 2010, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009, Rekam Jejak Kuasa Mengatur*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta

Mashad, Dhurorudin, 1998, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, PT. Grasindo, Jakarta

Maududi, Maulana Abul A'la, 2000, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

Mawardi, Irvan, 2011, *Pemilu dalam Cengkraman Oligarkhi (Fenomena Kegagasan Demokrasi Prosedural)*, Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, Makasar

MD., Moh. Mahfud, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Liberty, Yogyakarta

_____, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta

_____, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

Meisburger, Tim (Ed.), 2003, *Demokrasi di Indonesia, Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003*, Asia Foundation, Jakarta

Martin, Fransisco Forrest, at all., 2006, *International Human Rights and Humanitarian Law, Treaties, Cases, and Analysis*, Cambrigde University Press, New York

- Mochtar, Zainal Arifin 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muladi (Ed.), 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- Musa, Ali Masykur, 2003, *Sistem Pemilu : Proporsional Terbuka Setengah Hati*, Pustaka Indonesia Satu (PIS), kerja sama *Parliamentary Support and Public Participation, Project Supported by Partnership for Governance Reform in Indonesia and UNDP*, Jakarta
- _____, 2009, *Lompatan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta
- MZ., Rahmat Hollyson, dan Sri Sundari, 2015, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Penerbit Bestari, Jakarta
- Najib, Mohammad, 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, KPU Provinsi DIY, Yogyakarta
- Napang, Marthen, 2005, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, Yusticia Press, Makassar
- Nasution, Adnan Buyung, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosiolegal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta
- _____, 2010, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Nasiruddin, 2008, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, Penerbit Republika, Jakarta
- Negoro, Adi, *Pemilihan Umum dan Jiwa Masyarakat di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun terbit
- Nowak, Manfred, 2003, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, kerjasama *Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law* dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta
- Nurhasim, Moch. dan Ikrar Nusa Bakti (Ed.), 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Yogyakarta

- _____, 2011, *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta
- Panjaitan, Merphin, 2011, *Logika Demokrasi, Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Jakarta
- Penniman, Howard R., 1952, *American Parties and Elections, Fifth Edition*, Appleton-Century-Crofts, Inc., New York
- Poerbopranoto, Koentjoro, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, PT. Eresco, Bandung
- Poedjoboentoro, Soepeni, 1952, *Pemilihan Umum di India*, Unitra N.V. Bagian Penerbitan, Menteng Jakarta
- Prihatmoko, Joko J., 2008, *Mendemokratiskan Pemilu, dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta
- Rabi'ah, Rumidan, 2009, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ranadireksa, Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Penerbit Fokusnesia, Bandung
- _____, 2009, *Dinamika Konstitusi Indonesia (Edisi Kedua)*, Penerbit Fokusmedia, Bandung
- Rawls, John, 1971, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
- _____, 1981, *The Basic Liberties and Their Priority*, The Tanner Lectures on Human Values, delivered at The University of Michigan, 10 April, 1981
- Rifai, Amzulian, 2003, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ritzer, George & Barry Smart, 2001, *Handbooks Teori Sosial*, Alih Bahasa : Imam Muttaqien, dkk., Penerbit Nusa Media, Bandung

- Ritzer, George, 2011, *Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Alih Bahasa : Saut Pasaribu, dkk., Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rochman, Meuthia G., dkk., 1997, *HAM Sebagai Parameter Pembangunan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Russel, Bertrand, 2004, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Safa'at, Muchammad Ali, 2010, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia*, UB Press, Malang
- _____, 2011, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1981, *Menyongsong Pemilu 1982, Pelaksanaan UU Pemilu PP No. 41 Tahun 1980*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Samsudin, A. dkk., 1972, *Pemilihan Umum 1971, Seri Berita dan Pendapat*, Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, Jakarta
- Santoso, Kholid O. (Ed.), 2009, *Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung
- Sanit, Arbi, 2010, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Saragih, Bintan R., 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Saraswati, LG., dkk., 2006, *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia bekerjasama dengan *European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR) Uni Eropa*, Filsafat UI Press, Jakarta
- Shihab, M. Quraish, 2012, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Volume 2, Cetakan Kelima, Penerbit Lentera Hati, Jakarta
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta

- _____, 2010, *Hukum Tata Negara, Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama)*, BPFE, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soekarno, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi, Djilid Pertama*, Panitia Penerbit, Jakarta, hlm. 172-173
- Sorensen, George, 1993, *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Alih Bahasa : I Made Krisna (2003), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sudibjo, M. (Penyunting), 1995, *Pemilihan Umum 1992, Suatu Evaluasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Suleman, Zulfikri, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Sunny, Ismail, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta
- Supriyanto, Didik dan Ramlan Surbakti,(Ed.), 2014, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Kemitraan Partnership, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, Seri Demokrasi Elektoral (Buku 9), Kemitraan Partnership, Jakarta
- _____, 2011, *Menjaga Kedaulatan Pemilih*, Seri Demokrasi Elektoral (Buku 11), Kemitraan Partnership, Jakarta
- Susanti, Bivitri, dkk., 2000, *Semua Harus Terwakili, Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta
- _____, dkk., 2004, *Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 1999-2004*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta
- Suseno, Franz Magnis, 2016, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tambunan, A.S.S., 1986, *Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Sejarah Pengaturan, Pemikiran-pemikiran serta Permasalahan yang Melatarbelakanginya dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Binacipta, Jakarta

_____, 2000, *UUD 1945 Sudah Melihat Jauh ke Depan, Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara*, Puporis Publishiers, Jakarta

Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Tim Redaksi, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Tricahyo, Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang

Ujan, Andre Ata, 2001, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

Wahidin, Samsul, 2011, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Winarta, Frans Hendra, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Winters, Jeffry A., 2011, *Oligarki*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yahya, Imam, 2010, *Gagasan Fiqh Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, Walisongo Press, Semarang

Yuda, Hanta, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati, dari Dilema ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Zuhro, R. Siti, 2009, *Demokrasi Lokal, Peran Aktor dalam Demokratisasi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta

B. Disertasi, Tesis dan Jurnal

Alfan, Alfian, M., 2005, *Hak Politik TNI dan Pilkada*, Jurnal Politika, Vol. 1. No. 1, Mei 2015

Faiz, Pan Muhammad, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

- Gaussyah, M., 2011, *Hak Memilih Anggota Polri dalam Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Negara Indonesia yang Demokratis*, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Lubis, Todung Mulya, 2004, *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 011-017/PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, Jakarta, 2004
- Mulyono, Z.R.P.TJ., 2008, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Nazriyah, Riri, 2009, *Implikasi Putusan MK Terhadap Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- Prasojo, Teguh Adi, 2013, *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019*, E-Jurnal Politika, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013
- Radjab, Mansyur, 2014, *Analisis Model Tindakan Rasional pada Proses Transformasi Komunitas Petani Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kabupaten Jeneponto*, Jurnal Socius, Volume XV, Januari-April 2014
- Rosidin, 2015, *Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah*, Jurnal Madrasah, Volume 7, No. 2, Januari-Juni 2015
- Sirait, Sunggul Hamonangan, 2016, *Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Saldi Isra, 2009, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sarman, Mukhtar, 2015, *Menakar Kualitas Pilkada : Menstrukturkan Sebuah Kontestasi Politik yang Berintegritas*, Jurnal Etika & Pemilu Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2015
- Shidarta, 2004, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Susanti, Bivitri dkk., (2007), *Bobot Kurang Janji Masih Terutang, Catatan PSHK Tentang Kaulitas Legislasi 2006*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta

Suwardi, Yulima Permatasari, Muhammad Ali Azhar dan Kadek Dwita Apriani, 2016, *Faktor Figur dalam Keperpilihan Anggota DPRD Studi Kasus : Keterpilihan Anggota DPRD dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung pada Pemilu 2014*, E-Jurnal Politika Vol. 1, No. 1, Tahun 2016

Sutiyah, 2017, *Pemilihan Umum 1955 di Surakarta dan Yogyakarta*, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Ummul Firdaus, Sunny, 2016, *Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi tentang Formulasi Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yustiningrum, RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin, 2015, *Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014*, Jurnal Penelitian Politik, Ivolume 12 No 1, Juni 2015

Zulianssyah, 2007, *Hak Memilih Bagi Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum*, Tesis pada Konsentrasi Kajian Strategik Penegakan Hak Asasi Manusia, Kekhususan Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLII/MPRS/1966 tentang Perubahan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekarya*

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*

D. Putusan-Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-II/2004 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-IV/2006 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 23 Juli 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-VIII/2010 terkait permohonan pengujian Pasal 58 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010, terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013, terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013, terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XI/2013, terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XII/2014 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2014 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2014

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq

E. Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Bagian I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemandangan Umum*, tanggal 9 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Bagian II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Nomor 121 Surat No. 1, Pemandangan Umum*, tanggal 9 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Bagian III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemandangan Umum*, tanggal 11 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Bagian V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemandangan Umum*, tanggal 8 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Surat Presiden Republik Indonesia No. 3624/52-Pres, Soal : Rantjangan Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, tanggal 24 November 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jawaban Pemerintah Atas Laporan Bahagian Demi Bahagian Mengenai Rantjangan Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Penjelasan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR*, 21 November 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Keterangan/Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, tanggal 25 Agustus 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Resmi Persidangan II Rapat Pleno Terbuka ke-11, Pembicaraan Tingkat IV, Pengesahan RUU*, tanggal 7 November 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Resmi Persidangan I Rapat Pleno Terbuka ke-4, Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum Para Anggota*, tanggal 9 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Resmi Persidangan Rapat Pleno Terbuka ke-5, Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum Para Anggota*, tanggal 10 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menteri Dalam Negeri, Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Para Anggota DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969*, 15 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Resmi Persidangan I Rapat Pleno Terbuka ke-7, Pembicaraan Tingkat II, Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Anggota*, 15 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Catatan Kronologis Atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969*, tanggal 7 November 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat*, Sekretariat Jenderal, 1969

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pidato Pengantar pada Penyerahan 3 UU Bidang Politik*

(Kepartaian, Pemilihan Umum dan Susduk DPR/MPR/DPRD) ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Presiden Republik Indonesia, Surat Nomor R.11/PU/IX/1998 Perihal RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Jakarta, 16 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, , *Surat Nomor 357/LH-ASHUB/IX?1998 Perihal RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 16 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Terhadap RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Fraksi ABRI DPR, Pemandangan Umum Fraksi ABRI DPR-RI Atas RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Fraksi Persatuan Pembangunan DPR, Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI Terhadap Tiga Rancangan Undang-Undang Bidang Politik (RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD)*, Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI, Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI Terhadap RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, RUU tentang Partai Politik, dan RUU tentang Pemilu*, Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Umum, Rapat Kerja ke-1*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 26 Nopember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Umum, Rapat Kerja ke-2*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 3 Desember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pemilihan Umum, Rapat Panitia Kerja ke-4*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 10 Desember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Bidang Politik dalam Rapat Paripurna DPR-RI*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, tanggal 28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR RI Terhadap RUU Partai Politik, Pemilihan Umum dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPD dan DPD*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI Terhadap RUU Partai Politik, Pemilihan Umum dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPD dan DPD*, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan DPR RI Terhadap RUU Partai Politik, Pemilihan Umum dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPD dan DPD*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pendapat Akhir Fraksi ABRI DPR RI Terhadap RUU Partai Politik, Pemilihan Umum dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPD dan DPD*, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Sidang Paripurna DPR RI*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menteri Dalam Negeri, Penjelasan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 26 Agustus 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Audiensi (Ke-1) dengan PSDM dan PIANI*, Panitia Khusus RUU Tentang Pemilu, tanggal 27 Agustus 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, RDP (Ke-1) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, Panitia Khusus RUU Tentang Pemilu, tanggal 28 Agustus 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, RDPU (Ke-2) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, Panitia Khusus RUU Tentang Pemilu, tanggal 29 Agustus 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Audiensi (Ke-3) dengan PSDM dan PIANI*, Sekretariat Pansus RUU Tentang Pemilu, tanggal 29 Agustus 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilihan Umum, tanggal 3 September 2002 (RDPU ke-2), Dengar Pakar*, Sekretariat Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, Jakarta, 3 September 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus, Rapat Kerja (Ke-3) dengan Menteri Dalam Negeri, Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi*, tanggal 9 September 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus, RDPU (Ke-5) dengan Balera di Bandung*, Sekretariat Pansus RUU Pemilu, tanggal 16 September 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus, Rapat Kerja (Ke-5) dengan Menteri Dalam Negeri, Pembahasan DIM Persandingan*, tanggal 23 September 2002, Sekretariat Pansus RUU Pemilu, 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus, Rapat Pembahasan DIM Fraksi-fraksi dengan Pemerintah (Depdagri* Sekretariat Pansus RUU Pemilu,), tanggal 30 Oktober 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus, Rapat Pembahasan DIM Fraksi-fraksi dengan Pemerintah (Depdagri)*, Sekretariat Pansus RUU Pemilu, tanggal 4 November 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Panitia Khusus DPR RI, Jakarta, 2002

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.02/PU/I/2003, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 28 Januari 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-2 Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 24 Maret 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-3 Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 26 Maret 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-4 Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 31 Maret 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Dengar Pendapat Umum ke-2 dengan Komisi Pemilihan Umum, Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 3 April 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-3, Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 7 April 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-13 Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 23 April 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-9 Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 5 Mei 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-10 Pansus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 7 Mei 2003*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Legislasi DPR, 2004*

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R-27/pres/05/2007 Perihal Rancangan Undang-Undang di bidang Politik, RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, tanggal 25 Mei 2007
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, RDP/RDPU, Jakarta, 18 Juli 2007*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta 26 September 2007*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Rapat Panitia Kerja ke-XVIII, Jakarta, 20 Februari 2008*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Dengar Pendapat (RDP) & Rapat Dengat Pendapat Umum (RDPU), Jakarta, 26 Maret 2008*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Dengar Pendapat (RDP) & Rapat Dengat Pendapat Umum (RDPU), Jakarta, 2 April 2008*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Panitia Kerja, Jakarta, 19 Juni 2008*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Panitia Kerja, Jakarta, 20 Juni 2008*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Menteri Dalam Negeri & Menteri Hukum dan HAM, Jakarta, 6 Oktober 2011*
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat, Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, 13 Oktober 2011*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat, Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)*, Jakarta, 16 November 2011

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 23 November 2011

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Menteri Dalam Negeri & Menteri Hukum dan HAM*, Jakarta, 12 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat, Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 19 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 20 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat, Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 25 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat, Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 27 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 28 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 2 Februari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 13 Februari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 14 Februari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 15 Februari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 2 Maret 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 5 Maret 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Menteri Dalam Negeri & Menteri Hukum dan HAM*, Jakarta, 7 Maret 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat, Tim Perumus-Tim Sinoronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 8 Maret 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 31 Maret 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Menteri Dalam Negeri & Menteri Hukum dan HAM*, Jakarta, 9 April 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi II, Rapat Kerja, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, 15 Januari 2015

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Risalah Rapat Komisi II, Rapat Kerja, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, 19 Januari 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Keputusan DPR RI Nomor 03/DPRI/II/2014-2015* tanggal 20 Januari 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, Evaluasi Pilkada Serentak 2015*, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2 Februari 2016

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri*, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI, 14 April 2016

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi II DPR RI, Pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI Terhadap Rancangan Usul Inisiatif Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI, 15 April 2016

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Singkat Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Persiapan Pilkada Serentak 2017*, 6 Desember 2016.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Singkat Komisi II DPR RI Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu*, 7 Oktober 2017

F. Hukum Internasional dan Konstitusi-Konstitusi Beberapa Negara

Universal Declaration of Human Rights

Univesal Declaration on Democracy, The Elements and Exercise of Democratic Government

Charter of the United Nations and Statute of The International Court of Justice

The ASEAN Charter

Charter of Fundamental Rights of The European Union

International Convention on Civil and Political Rights

American Convention on Human Rights "Pact of San Jose, Costa Rica"

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Constitution of The Federative Republic of Brazil

The Constitution of the United States

The 1987 Constitution of the Republik of The Philipines

The Constitution of The Republic of Singapore

Basic Law for the Federal Republic of Germany

Constitution of The Arab Republik of Egypt 2014

Constitution of the Republic of South Africa, No. 108 of 1996

Constitution of the Syrian Arab Republic

France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008

Netherlands Contitution

Kuwait's Constitution of 1962

State of New York 2017, Election Law

The Florida Election Code, Revised : July 2017

G. Laporan Penelitian, Makalah dan Kertas Kerja

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, makalah dalam *stadium general* pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta 19 Desember 2005

Daftar Kasus Korupsi Anggota DPR, DPRD dan kepala daerah yang ditangani KPK, Indonesia Corruption Watch, 2017

Fahmi, Khairul, 2009, *Perkembangan Pemikiran dan Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Nasional*, makalah (tidak dipublikasikan) disampaikan dalam Pelatihan HAM yang dilaksanakan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 2009

- Manan, Bagir, 2016, *Demokratisasi Partai Politik*, Pidato disampaikan dalam Konferensi Hukum Tata Negara ke-3 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bukittinggi, 5 September 2016
- MD., Mahfud, Moh., 2012, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, Proseding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 24-26 Januari 2012
- Purwoko, Bambang, 2005, *Netralitas Birokrasi dalam Pilkada Langsung*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Maret 2005
- Saldi Isra, dkk., 2015, *Laporan Penelitian Pembaharuan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2007, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertian Dari Masa ke Masa*, Serial Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

H. Internet dan Media Massa Cetak

- Ramlan Surbakti, 2014, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014
- Harian Pelita, Utusan MK : Pidana Mati Tak Bertentangan dengan UUD 1945, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38659>, diakses tanggal 12 Maret 2016
- MK : Anggota TNI-Polri Tak Punya Hak Pilih dalam Pilpres, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/28/1226045/MK.Anggota.TNI.Polri.Tak.Punya.Hak.Pilih.dalam.Pilpres>, diakses tanggal 15 Januari 2016
- Wahyudi Djafar : Belum Saatnya TNI/Polri Bisa Memilih, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/6049/Wahyudi-Djafar-Belum-Saatnya-TNIPolri-Bisa-Memilih>, diakses tanggal 15 Januari 2016
- Diolah dari Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses tanggal 25 Januari 2018

MK : Keluarga Petahan Bisa Ikut Pilkada, <https://nasional.sindonews.com/read/1021819/149/mk-keluarga-petahana-bisa-ikut-pilkada-1436409915>, diakses tanggal 2 Maret 2017

Koalisi Pilkada Bersih, *Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017*, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2017

Saldi Isra, *Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional*, Harian Media Indonesia, 22 Agustus 2016

Survei : Mayoritas Masyarakat Nilai Politik Dinasti Berdampak Buruk, <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/2005546/Survei.Mayoritas.Masyarakat.Nilai.Politik.Dinasti.Berdampak.Buruk>, diakses tanggal 6 Maret 2017

http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2017

<http://www.watchindonesia.org/wp-content/uploads/Teraju19.5.14.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2017

4 Faktor Penyebab Munculnya Golput, <https://nasional.sindonews.com/read/836311/113/4-faktor-penyebab-munculnya-golput-1392588229>

Bupati Bengkulu Selatan : Saya Tidak Terima Suap, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/16/00131571/bupati-bengkulu-selatan-saya-tidak-terima-suap>, diakses tanggal 16 Mei 2018

Bravo "Partai Golput" <http://www.watchindonesia.org/wp-content/uploads/Teraju19.5.14.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Waketum Gerindra Nilai WAjar Diminta Rp. 40 Miliar oleh Prabowo, <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/10140391/waketum-gerindra-nilai-wajar-jika-la-nyalla-diminta-rp-40-miliar-oleh>, diakses tanggal 13 Januari 2018

Mahar dalam Pilkada, <https://nasional.sindonews.com/read/1029921/18/mahar-dalam-pilkada-1438823576>, diakses tanggal 13 Januari 2018

ICW : 48 Calon Anggota Legislatif Terlibat Korupsi, <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/16541981/ICW.48.Calon.Anggota.Legislatif.Terpi> lih.Terlibat.Korupsi, diakses tanggal 21 Desember 2017

Mantan Napi Jadi Anggota DPRD, <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/76250>, diakses tanggal 22 Desember 2017

Wakil Ketua DPRD Jateng Dilantik dalam Status Tersangka, <http://news.liputan6.com/read/87557/wakil-ketua-dprd-jateng-dilantik-dalam-status-tersangka>, diakses tanggal 22 Desember 2017

Wakil Ketua DPRD Jateng Dilantik dalam Status Tersangka, <http://news.liputan6.com/read/87557/wakil-ketua-dprd-jateng-dilantik-dalam-status-tersangka>, diakses tanggal 22 Desember 2017

Wakil Ketua DPRD Jateng Dilantik dalam Status Tersangka, <http://news.liputan6.com/read/87557/wakil-ketua-dprd-jateng-dilantik-dalam-status-tersangka>, diakses tanggal 22 Desember 2017

Rapor Merah Kiberja Partai Politik, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/23/1156086/Rapor.Merah.Kinerja.Partai.Politik>, diakses tanggal 21 Desember 2017

Teguh Prakoso, Slamet Subagyo, dan Siti Rochani, 2018, *Rasionalitas Like di Sosial Media Siswa SMA Negeri 1 Teras, Boyolali*, <https://media.neliti.com/media/publications/164992-ID-rasionalitas-like-di-sosial-media-siswa.pdf>, diakses tanggal 10 April 2018.

Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah, <https://nasional.tempo.co/read/689110/ini-9-bekas-napi-yang-kini-jadi-calon-kepala-daerah>, diakses tanggal 21 Desember 2017

Bupati Tersangka Tetap Dilantik, *Harian Media Indonesia*, 17 Februari 2016

Mantan Napi Lampung Selatan Jadi Bupati Terpilih, <http://www.suarawajarfm.com/2015/12/23/11117/mantan-napi-lampung-selatan-jadi-bupati-terpilih.html>, diakses tanggal 22 Desember 2017

<http://www.inilahjambi.com/wah-mantan-narapidana-korupsi-ini-menang-di-pilkada-solok/>, diakses tanggal 22 Desember 2017

Bupati Tersangka Tetap Dilantik, *Harian Media Indonesia*, 17 Februari 2016

Anggota DPRD Jatim yang Ditangkap Mantan Narapidana Korupsi, <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/07/10285451/anggota.dprd.jatim.yang.ditangkap.kpk.mantan.narapidana.korupsi>, diakses tanggal 22 Desember 2017

Negara Bisa Ngak Manju-maju Jika Dipimpin Eks Narapidana, <http://www.rmol.co/read/2015/07/13/209862/Negara-Bisa-Nggak-Maju-maju-Jika-Dipimpin-Eks-Narapidana->, diakses tanggal 22 Desember 2017

Mufid A. Busyairi, *Evaluasi Kinerja DPR 2004-2009*, Koran Tempo, <https://malang.aji.or.id/2009/08/31/evaluasi-kinerja-dpr-2004-2009/>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Kinerja DPR 2009-2014 Tak Memuaskan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141219181503-32-19419/kinerja-dpr-2009-2014-tak-memuaskan>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Mufid A. Busyairi, *Evaluasi Kinerja DPR 2004-2009*, Koran Tempo, <https://malang.aji.or.id/2009/08/31/evaluasi-kinerja-dpr-2004-2009/>, diakses tanggal 20 Desember 2017

18 UU Hasil DPR Periode 2004-2009 Digugat ke MK, <http://nasional.kontan.co.id/news/18-uu-hasil-dpr-periode-2004-2009-digugat-ke-mk-1>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah Dipertanyakan, <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/24/15204531/Fungsi.Pengawasan.DPR.terhadap.Pemerintah.Dipertanyakan>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Fungsi Pengawasan DPR Tumpul dan Tidak Transparan, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/24/fungsi-pengawasan-dpr-tumpul-dan-tidak-transparan>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Diwarnai Aksi “Walk Out” DPR Sahkan UU Pemilu, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>, diakses tanggal 25 Juli 2017

FITRA : Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR Masih Buruk, <https://tirto.id/fitra-fungsi-anggaran-dan-pengawasan-dpr-masih-buruk-cvwB>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Banggar DPR dalam Lingkaran Korupsi, <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/28/11001688/Banggar.DPR.dalam.Lingkaran.Korupsi>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Wakil Ketua DPR Mengakui Kinerja Legislasi Wakil Rakyat Tak Bagus, <https://nasional.tempo.co/read/896104/wakil-ketua-dpr-mengakui-kinerja-legislasi-wakil-rakyat-tak-bagus>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Menurut Akbar, Ini Penyebab Jebloknya Kinerja DPR, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/11/1636471/Menurut.Akbar.Ini.Penyebab.Jebloknya.Kinerja.DPR>, diakses tanggal 20 Desember 2017

KPK : Sebanyak 361 Kepala Daerah Terlibat Korupsi, <https://www.suara.com/news/2016/08/11/054655/kpk-sebanyak-361-kepala-daerah-terlibat-korupsi>, diakses tanggal 13 Januari 2018

KPK : 74 Anggota DPR Terlibat Korupsi, <https://nasional.tempo.co/read/570877/kpk-74-anggota-dpr-terlibat-korupsi>, diakses tanggal 3 Januari 2018

3.169 Anggota DPRD Terkena Kasus Korupsi, <https://nasional.sindonews.com/read/890578/13/3169-anggota-dprd-terkena-kasus-korupsi-1407855021>, diakses tanggal 13 Januari 2018

Dana Gedung Baru DPR Rp. 5,7 Triliun Disetujui, Klaim atau Fakta, <https://fokus.tempo.co/read/1027175/dana-gedung-baru-dpr-rp-57-triliun-disetujui-klaim-atau-fakta>, diakses tanggal 13 Januari 2018

DPR Klaim Pembentukan Pansus Angket KPK Sesuai Aturan, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/20184281/dpr-klaim-pembentukan-pansus-angket-kpk-sesuai-aturan>, diakses tanggal 13 Januari 2018

Kinerja DPR 2004-2009 Dinilai Payah, <http://news.liputan6.com/read/245854/kinerja-dpr-2004-2009-dinilai-payah>, diakses tanggal 14 Januari 2017

Kinerja DPR 2004-2009 Dinilai Mengeceawakan, <https://rakyatdemokrasi.wordpress.com/2009/10/01/kinerja-dpr-2004-2009-dinilai-mengeceawakan/>, diakses tanggal 14 Januari 2017

Partai Nazi, https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nazi, diakses tanggal 20 Desember 2017

Cara Jerman Mencegah Kebangkitan Nazi, <https://tirto.id/cara-jerman-mencegah-kebangkitan-nazi-cwWz>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Mesir Bubarkan “Partai” Ikhwanul Muslimin, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/08/140810_egypt, diakses tanggal 20 Desember 2017

Thai Rak Thai, https://id.wikipedia.org/wiki/Thai_Rak_Thai, diakses tanggal 20 Desember 2017

Partai Thai Rak Thai Dibubarkan, Thaksin Dilarang Berpolitik, <https://news.detik.com/berita/d-787473/partai-thai-rak-thai-dibubarkan-thaksin-dilarang-berpolitik>, diakses tanggal 20 Desember 2017

Wawancara

Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Medan, 4 Oktober 2017

Moh. Mahfud MD., Wawancara, Jember 10 November 2017

Ramlan Surbakti, Wawancara, Surabaya, 13 November 2017

A. Mukhtie Fadjar, Wawancara, Malang, 14 November 2017

Topo Santoso, Wawancara, Jakarta, 15 November 2017